

**PERSEPSI *STAKEHOLDER* TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM
KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
(Studi Kasus pada *Business Development Center* Sriwijaya Kota Palembang)**

SKRIPSI



**Nama : Angga Arisa Putra
NIM : 222015034**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PERSEPSI *STAKEHOLDER* TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM
KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
(Studi Kasus pada *Business Development Center* Sriwijaya Kota Palembang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Angga Arisa Putra
NIM : 222015034**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Persepsi *Stakeholder* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Kasus pada *Business Development Center* Sriwijaya Kota Palembang)
Nama : Angga Arisa Putra
NIM : 222015034
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterimah dan Disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0206046303/784021

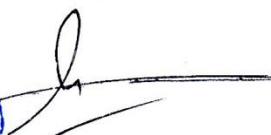
Pembimbing II,



Welly, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0212128102/1085022

**Mengetahui,
Dekan
u.b.Ketua Program Studi Akuntansi**




Betri, SE, M.Si, Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ *Dengan Seni Hidup Jadi Indah, Dengan Ilmu Hidup Jadi Mudah dan Dengan Agama Hidup Jadi Terarah. (Ustadz Marsudi)*
- ❖ *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah/2: 286)*
- ❖ *Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah/94: 6)*
- ❖ *Awali dengan Basamalah dan akhiri dengan Hamdalah*

(Angga Arisa Putra)

Dengan ridho ALLAH SWT

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ *Bak dan Umakku*
- ❖ *Saudariku*
- ❖ *Pembimbing Skripsiku*
- ❖ *Keluarga besarku*
- ❖ *Sahabat seperjuanganku*
- ❖ *Almamaterku*

PRAKATA



Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Persepsi *Stakeholder* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Kasus pada *Business Development Center* Sriwijaya Kota Palembang)”.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan saudariku yang telah memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si dan Ibu Welly, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, S.E.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staff dan karyawan/karyawati.

3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu DR. Hj. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 2019

Penulis

Angga Arisa Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori	18
1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	18
2. Persepsi.....	19
a. Pengertian Persepsi.....	19
b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	21
3. <i>Stakeholder</i>	22
4. Akuntabilitas	25
a. Pengertian Akuntabilitas.....	25
b. Macam-macam Akuntabilitas	28
c. Dimensi Akuntabilitas	29
5. Pengelolaan Keuangan <i>Business Developmet Center</i> (BDC).....	30
a. Tahapan Pengelolaan BDC	30

b. Peruntukan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).....	30
c. Pengelolaan Keuangan Pengelola BDC.....	32
B. Penelitian Sebelumnya	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Operasionalisasi Variabel.....	51
D. Populasi	51
E. Data yang Diperlukan.....	52
F. Metode Pengumpulan Data	53
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	55
1. Analisis Data.....	55
2. Teknik Analisis	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	61
1. Gambaran Umum <i>Business Development Center</i> (BDC) Sriwijaya Kota Palembang.....	61
a. Sejarah <i>Business Development Center</i> (BDC) Sriwijaya Kota Palembang	61
b. Visi dan Misi <i>Business Development Center</i> (BDC) Sriwijaya Kota Palembang.....	65
c. Struktur Organisasi.....	66
d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite <i>Business Development Center</i> (BDC) Sriwijaya Kota Palembang.....	68
2. Gambaran Umum Karakteristik Responden	71
3. Uji Instrumen Penelitian	74
a. Uji Validitas	74
b. Uji Reliabilitas.....	75
B. Pembahasan	76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) BDC	9
Tabel I.2 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), realisasi penggunaan dana BLM oleh pengelola BDC Sriwijaya kota Palembang tahun 2016-2018.....	10
Tabel I.3 Rekapitulasi Progres Pemanfaatan BLM BDC Tahap I	13
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	46
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	51
Tabel III.2 Daftar Populasi	52
Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	72
Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	72
Tabel IV.4 Tingkat Pengembalian Kuesioner	73
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas Persepsi <i>Stakeholder</i> terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.....	74
Tabel IV.6 Hasil Uji Reliabilitas	76
Tabel IV.7 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	77
Tabel IV.8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas Proses.....	81
Tabel IV.9 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas Program	85
Tabel IV.10 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas Kebijakan.....	90
Tabel IV.11 Ringkasan Skor Rata-rata Seluruh Indikator	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi BDC Sriwijaya Kota Palembang	67
Gambar IV.2 Posisi Rata-Rata Indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	81
Gambar IV.3 Posisi Rata-Rata Indikator Akuntabilitas Proses	84
Gambar IV.4 Posisi Rata-Rata Indikator Akuntabilitas Proram.....	90
Gambar IV.5 Posisi Rata-Rata Indikator Akuntabilitas Kebijakan	93
Gambar IV.6 Posisi Rata-Rata Seluruh Indikator.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Statistik Deskriptif Karakteristik Responden

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas Kuesioner

Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Lampiran 5 Hasil Pengolahan Data dengan Statistik Deskriptif

Lampiran 6 Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 7 Fotocopy Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian

Lampiran 8 Fotocopy Sertifikat Lulus Membaca Surat-Surat Pendek Al-Qur'an

Lampiran 9 Fotocopy Sertifikat Toefl

Lampiran 10 Plagiarism Checker

Lampiran 11 Biodata Penulis

ABSTRAK

Angga Arisa Putra/222015034/2019/Persepsi *Stakeholder* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Kasus pada *Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Persepsi *Stakeholder* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada *Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang*?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi *Stakeholder* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada *Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang*. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah *stakeholder Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang* sejumlah 35 responden. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi *stakeholder* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan *business development center sriwijaya kota Palembang* adalah sangat baik. Hal ini terlihat dari skor rata-rata seluruh indikator menunjukkan nilai *mean* sebesar 4,36 yang berada pada skala interval 4,20-5,00.

Kata Kunci: persepsi *stakeholder*, akuntabilitas pengelolaan keuangan

Abstract

Angga Arisa Putra/222015034/2019/ Stakeholders' Perception on the Accountability of Financial Management of the Kota Tanpa Kumuh Program (A Case Study at the Sriwijaya Business Development Center in Palembang.

This research is formulated on the perception of the Stakeholder's Perception on the Financial Management Accountability of the Kota Tanpa Kumuh Program (KOTAKU) at the Sriwijaya City Business Development Center?. This research is aimed at determining the Stakeholders' Perceptions on the Financial Management Accountability of the Kota Tanpa Kumuh Program (KOTAKU) at the Sriwijaya Business Development Center in Palembang City. The type of the research was a descriptive research. The data used in this research was primary data and secondary data. The population of the research was stakeholders of Sriwijaya Business Development Center in Palembang. There were 35 respondents used as samples. Data collection techniques were through questionnaires and documentation. The data analysis method used was a quantitative and qualitative analysis. The results showed that stakeholders' perceptions on the accountability of the financial management of Sriwijaya business development center in Palembang were very good. This could be seen from the average score of all indicators showing a mean value of 4.36 at the interval scale of 4.20-5.00.

Keywords: *perception of stakeholders, accountability financial management*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program KOTAKU merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Program KOTAKU merupakan program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi dan telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada tanggal 27 april 2016 bertempat di Jakarta yang bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Program KOTAKU menyediakan Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada kelompok masyarakat dan kelembagaan yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta pengembangan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Jenis Kegiatan yang dibiayai oleh BDI adalah kegiatan pelayanan infrastruktur, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan pelayanan ekonomi.

Program KOTAKU melakukan pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk usaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha yang produktif ke jaringan yang lebih luas. Dalam upaya memfasilitasi pengembangan dan jaringan usaha KSM tersebut, program KOTAKU mengembangkan program lanjutan dengan nama pilot *Business Development Center* (BDC) di tingkat kabupaten/kota. BDC merupakan simpul jaringan usaha dan sarana pengembangan KSM yang mencakup fasilitasi pengembangan pemasaran, produksi, sumber daya manusia (SDM), akses pembiayaan serta pengembangan ekonomi lokal serta sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh di perkotaan.

BDI untuk BDC dialokasikan pada kabupaten/kota lokasi BDC yang terpilih dan digunakan untuk mengembangkan usaha (bisnis) KSM yang menghasilkan produk usaha sesuai dengan produk yang memiliki potensi pasar. BDI untuk BDC digunakan untuk mendukung kegiatan yang dapat

meningkatkan usaha KSM dampingan, baik langsung maupun tidak langsung yang mengacu pada rencana usaha (*business plan*). Jenis-jenis kegiatan dalam BDC terdiri dari dan tidak terbatas pada: 1. intermediasi bisnis, yang berupa pengembangan produk, pengembangan pemasaran, pengembangan kemitraan, dan kegiatan lain yang secara aktif dapat meningkatkan usaha KSM. 2. penguatan kapasitas bagi KSM, BDC, pemerintah daerah dan kelompok peduli/*stakeholders* lain. 3. advokasi kebijakan.

Kegiatan BDC dilakukan melalui kerjasama (kolaborasi) dan sinergi antara kebijakan dan program pemerintah daerah dalam pengembangan produk unggulan, potensi pasar dan dukungan *stakeholders*, dengan potensi usaha produktif yang dikembangkan kelompok-kelompok masyarakat (KSM-KSM), khususnya masyarakat miskin. Tahapan pelaksanaan kegiatan pilot BDC terdiri dari 5 (lima) tahapan yaitu tahap persiapan program, tahap perencanaan dan pembentukan kelembagaan BDC, tahap pencairan dan pemanfaatan bantuan langsung masyarakat BDC, tahap pengelolaan BDC, dan tahap pengembangan BDC.

Struktur kelembagaan BDC terdiri dari komite BDC dan pengelola BDC. Komite BDC adalah struktur tertinggi dari kelembagaan BDC yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah dan non pemerintah daerah. Komite BDC tidak memiliki kewenangan dalam mengelola bantuan dana investasi BDC (cukup menampung), kecuali maksimal Rp. 5.000.000 yang diperuntukan bagi biaya operasional komite BDC. Selanjutnya jika pengelola BDC telah memenuhi persyaratan pemanfaatan bantuan langsung

masyarakat, maka tugas komite BDC segera mencairkan ke rekening pengelola BDC yang dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada rencana penggunaan dana (RPD) BDI BDC. Sedangkan pengelola BDC adalah tim pelaksana yang dibentuk oleh komite BDC yang akan mengelola kegiatan dan usaha BDC. Pengelola BDC memiliki tugas dan kewajiban mengelola kegiatan dan usaha BDC sesuai dengan sistem pengelolaan, rencana kerja, rencana usaha dan target-target yang sudah disepakati oleh pengelola BDC bersama komite BDC.

Pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* menurut *World Bank* suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan dana pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* agar pelaksana atau pelaku yang berwenang dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku.

Pengelolaan keuangan pengelola BDC menjadi bagian yang penting dalam menentukan kesuksesan mencapai tujuan. Pengelolaan keuangan pengelola BDC mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, artinya semua dana yang diperoleh/diterima penggunaannya dilakukan secara terbuka

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku/pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Menurut Deriranto dalam Jonathan (2010: 21) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi dapat dinyatakan sebagai pemberian makna pada stimuli indrawani (*sensory stimuli*). Cambridge dalam Yasir (2017: 21-22) mendefinisikan persepsi (*perception*) adalah “*a belief or opinion, often held many people on appearances*” atau suatu kepercayaan atau pendapat yang biasanya diberikan oleh orang banyak terhadap sesuatu yang di amati. Persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu. Dalam proses persepsi, individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek yang dapat bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang, dan sebagainya. Dengan adanya persepsi, maka terbentuk sikap, yaitu suatu kecendrungan yang stabil untuk berlaku atau bertindak dengan tindakan yang khas dalam situasi yang tertentu pula.

Prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik salah satunya adalah akuntabilitas (*accountability*). Rakhmat (2017: 130) menyatakan *accountability*, para pembuat kebijakan dalam pemerintahan bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Rakhmat (2017: 137-138) menyatakan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Mahmudi (2016:18) menyatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Mulgan dalam Mahmudi (2016:19) mengidentifikasi terdapat empat tahapan dalam proses akuntabilitas publik, yaitu: proses akuntansi dan pelaporan, proses pencairan informasi dan investigasi, proses penilaian dan verifikasi informasi, dan proses pengendalian atau pengawasan.

Mardiasmo (2009: 20-21) menyatakan akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: 1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban uni-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. 2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung-jawaban kepada masyarakat luas.

Rakhmat (2017: 144) menyatakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sektor publik diperlukan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memeberikan dananya kepada pemerintah, khususnya pertanggungjawaban mengenai pengolahan keuangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat ini disebut akuntabilitas publik. Dengan kata lain, dalam

akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Rakhmat (2017: 145-147) menjelaskan dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut, antara lain akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for public and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas program (*program accountability*), akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Menurut Schacter dalam Rakhmat (2017: 147-148) pelaksanaan akuntabilitas pada dasarnya memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan politik (*political purpose*), yaitu akuntabilitas merupakan suatu mekanisme untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, tujuan operasional (*operational purpose*), yaitu akuntabilitas merupakan mekanisme untuk membantu menjamin pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. Pengawasan merupakan salah satu kriteria dalam akuntabilitas. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan kondisi saling mengawasi antara seluruh *stakeholder*.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan persepsi *stakeholder* terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sarlota (2016), Dheny (2016), dan Mukhtaruddin (2011) menyatakan bahwa antara *stakeholder* internal dan

stakeholder eksternal terdapat persepsi yang berbeda terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sukirman (2009) menyatakan bahwa antara *stakeholder* internal tidak berbeda secara signifikan dengan persepsi para *stakeholder* eksternal.

Kota Palembang merupakan salah satu kota yang telah dilaksanakannya program KOTAKU. Kota Palembang juga merupakan salah satu kota yang terpilih untuk melaksanakan *Business Development Center* (BDC) dari 15 kabupaten/kota se Indonesia. BDC di kota Palembang diberi nama BDC Sriwijaya. BDC Sriwijaya merupakan institusi atau unit organisasi sebagai simpul dari jaringan kemitraan sinergis antara masyarakat (badan keswadayaan masyarakat (BKM) serta KSM produktif) dengan pemerintah daerah dan pelaku bisnis serta kelompok peduli lainnya dalam rangka mengembangkan produk unggulan daerah yang memberikan jasa pelayanan terpadu untuk menumbuh kembangkan usaha yang produktif dan inovatif.

BDC memberikan jasa layanan kepada BKM/KSM dapat berupa layanan intermediasi bisnis, inkubasi bisnis, akses informasi bisnis, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan teknologi maupun fasilitasi akses pembiayaan bisnis. Pengelola BDC yang merupakan tim pelaksana yang dibentuk oleh komite BDC yang akan mengelola kegiatan dan usaha BDC. Pentingnya tugas pengelola BDC Sriwijaya yang mengelola kegiatan dan usaha BDC yang mana dana tersebut bersumber dari bantuan langsung masyarakat (BLM) yang dicairkan dari komite perlu di perhatikan penilaian akuntabilitasnya, karena dana yang diberikan tersebut bersumber

dari pemerintah yang diberikan melalui program KOTAKU. Penilaian akuntabilitas yang positif dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan memberikan gambaran keberhasilan yang telah dicapai.

Bantuan langsung masyarakat (BLM) dikelola oleh BDC untuk sebesar-besarnya bagi peningkatan usaha KSM. BLM BDC sebesar Rp. 2.000.000.000 per kabupaten/kota, disalurkan langsung kepada komite BDC dan dicairkan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 75% dan tahap II sebesar 25%. Persyaratan pencairan dan pemanfaatan BLM, diuraikan dalam Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1
Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) BDC

Tahap Pencairan	Syarat Pencairan ke Komite BDC	Syarat Pemanfaatan oleh Pengelola BDC
Tahap I (75% dari total Bantuan Langsung Masyarakat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan (SK) Pembentukan Komite BDC 2. Adanya Rencana Kerja Komite BDC 3. Adanya rekening Bank Komite BDC ditandatangani oleh 3 orang perwakilan anggota Komite BDC, terdiri dari 3 unsur (Pemda, BKM, KSM/Kelompok Peduli), yang salah satunya menjabat sebagai ketua Komite BDC 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen Rencana Usaha (<i>Business Plan</i>) yang dihasilkan <i>Feasibility Study</i> (FS). 2. Pengelola BDC sudah terbentuk dan sudah disahkan oleh Komite BDC. 3. Pengelola BDC sudah mendapatkan pelatihan dasar "Pengelolaan BDC". 4. Ada Rencana Kegiatan dan Bisnis BDC Tahun ke-1. 5. Ada Rekening bank pengelola BDC ditandatangani oleh 3 orang, terdiri Manajer, Staf Pengelola BDC (non bendahara/kasir) dan salah satu anggota Komite BDC, kecuali Bendahara Komite BDC.
Tahap II (25% dari total Bantuan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pemanfaatan BOP 2. Laporan Pemanfaatan Bantuan Langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola BDC telah mengikuti Pelatihan Lanjutan "Pengelolaan BDC". 2. Bantuan Langsung Masyarakat

Langsung Masyarakat)	Masyarakat Tahap I 3. Bantuan Langsung Masyarakat Tahap I sudah disalurkan ke Pengelola BDC, minimal 50%	Tahap I yang diterima pengelola sudah termanfaatkan sekurang-kurangnya 25%. 3. Hasil evaluasi oleh Komite BDC menunjukkan kinerja Pengelola BDC berjalan dengan baik.
----------------------	---	--

Sumber: Prosedur operasional baku penyelenggaraan pilot BDC

BDC Sriwijaya mulai beroperasi pada tahun 2016. Besarnya bantuan langsung masyarakat (BLM) yang diterima oleh komite BDC Sriwijaya dan dana yang disalurkan kepada pengelola BDC Sriwijaya dan realisasi penggunaan dana BLM oleh pengelola BDC Sriwijaya dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut:

Tabel I.2
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), realisasi penggunaan dana BLM oleh pengelola BDC Sriwijaya kota Palembang tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah dana BLM tahap I 75 % (Rp)	Dana yang Disalurkan ke Pengelola	Realisasi Penggunaan Dana BLM oleh pengelola	%
2015	1.500.000.000	-	-	-
2016	-	949.902.500	362.260.550	38,14 %
2017	-	-	297.512.355	31,32 %
2018	-	-	93.260.632	9,81 %
Jumlah	1.500.000.000	949.902.500	753.033.537	79,27 %

Sumber: Sekretariat Koordinator kota 1 Palembang. data diolah peneliti, 2019

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk BDC sebesar Rp. 2.000.000.000 per kabupaten/kota, BLM telah disalurkan langsung kepada komite BDC Sriwijaya tahun 2015 yaitu sebesar 75% dari total BLM dengan nominal Rp.1.500.000.000. Realisasi penggunaan dana BLM oleh pengelola BDC Sriwijaya dari tahun 2016-2018 sebesar 79,27% dari dana BLM yang diterima oleh pengelola.

Tabel I.2 menggambarkan BDC belum optimal dalam mengelola kegiatan dan usahanya seperti yang dijelaskan dalam laporan progres revitalisasi BDC Sriwijaya Palembang tahun 2018. Berdasarkan laporan progres revitalisasi BDC Sriwijaya Palembang tahun 2018 menyatakan bahwa kelembagaan BDC belum berjalan maksimal, hal ini dilihat dari keaktifan komite BDC yaitu 6 orang dari total anggota komite berjumlah 21 orang. Rencana usaha (*business plan*) belum dijadikan landasan kerja BDC. Hal ini tentu saja terdapat kesenjangan teori dengan akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi.

BDC belum mampu memfasilitasi dengan baik terkait kebutuhan KSM, secara umum BDC belum mampu menutupi biaya operasionalnya, belum semua tenaga ahli yang direkrut BDC mampu berkontribusi dalam peningkatan usaha, belum semua BDC mampu menjalin kemitraan dengan para pihak karena kendala badan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut mengindikasikan BDC Sriwijaya belum menerima BLM tahap II yaitu 25% dari total BLM pada tahun 2017-2018, hal ini dikarenakan pengelolaan BDC menggambarkan kinerja yang buruk. Hal ini terdapat kesenjangan teori dengan akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan pertimbangan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pilot BDC menurut Budi Yana Saifullah yang merupakan tenaga ahli (TA) *livelihood* konsultan manajemen pusat (KMP) wilayah 1, yaitu: 1. secara umum BDC belum optimal dalam mengelola usahanya dan memfasilitasi kebutuhan peningkatan usaha KSM potensial, khususnya masalah pemasaran. 2. biaya operasional (BOP) BDC mendekati habis dan belum mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri. Hal ini tentu saja terdapat kesenjangan teori dengan akuntabilitas proses terkait dengan prosedur administrasi dengan biaya yang murah. Pemanfaatan dana BLM untuk BDC Sriwijaya dapat dilihat pada rekapitulasi progres pemanfaatan BLM tahap I pada Tabel I.3 berikut:

Tabel I.3
Rekapitulasi Progres Pemanfaatan BLM BDC Tahap I
Status Tanggal: 31 Januari 2019

REKAPITULASI PROGRES PEMANFAATAN BLM BDC TAHAP 1

Kota/Kabupaten: Palembang

Provinsi: Sumatera Selatan

Status Tanggal: 31 JANUARI 2019

NO.	JENIS KEGIATAN PEMANFAATAN BLM	KETENTUAN PLAFON PEMBIAYAAN BLM	PROGRES PEMANFAATAN BLM			%
			Rincian* (Rp)	Sub Total (Rp)	Total (Rp)	
1.	Biaya Operasional Komite BDC	5.000.000	2.405.500	2.405.500	2.405.500	48,11%
2.	Biaya Operasional Pengelola BDC	25.000.000	24.997.385	24.997.385	24.997.385	99,99%
3.	Honor Pengelola BDC	60.000.000		59.297.000	59.297.000	98,8%
3,1	Manajer Pengelola		28.000.000			
3,2	Staf Keuangan		19.000.000			
3,3	Staf Administrasi		12.177.000			
	Penjaga Kantor		120.000			
4.	Biaya Tim Ahli Pengembangan Usaha BDC	100.000.000		40.000.000	40.000.000	40,00%
4,1	1. TA Produksi Pempek		10.000.000			
4,2	2. TA Pemasaran		10.000.000			
4,3	3. TA Pelatihan Pengembangan Kapasitas KSM		10.000.000			
4,4	4. TA Produksi Songket		10.000.000			
4,5	5. TA Produksi Pepaya		-			
	dst					
5.	Biaya CB Pemda, Komite BDC dan Pengelola BDC	100.000.000				0,0%
6.	Biaya sewa kantor BDC yang operasional	100.000.000			98.503.002	98,50%
6,1	Biaya Sewa Kantor		76.000.000	76.000.000		
6,2	Keperluan kantor		22.503.002	22.503.002		

7.	Pengembangan BDC (Fasilitas Usaha):	1.010.000.000				0,0%	
7.1	Investasi Bisnis (Rantai Bisnis KSM):						
	7.1.A1. Stockist Bahan Baku Pempek		60.769.300		88.397.800	506.701.250	50,17%
	7.1.A2. Stockist Produk Pempek		16.203.500				
	7.1.A3. Kemasan Pempek		11.425.000				
	7.1.B1. Stockist Bahan Baku Songket		14.300.000		19.100.000		
	7.1.B2. Stockist Produk Songket						
	7.1.B3. Kemasan Songket						
	7.1.B4. Upah Pembuatan Songket (Kain dan Selendang)		4.800.000				
	7.1.C1. Stockist Pakan Lele		44.126.000		44.779.250		
	7.1.C2. Stockist		653.250				
	7.1.C4. Kemasan						
	7.1.D.Penyediaan/Sewa Peralatan Produksi		284.424.200	284.424.200			
	SEWA KANTOR		70.000.000	70.000.000			
7.2	Fasilitas Pengembangan Usaha KSM:						
	a. Pengembangan/peningkatan kapasitas usaha KSM		13.800.600	13.800.600	23.534.900	23,5%	
	b. Notaris dan Perizinan usaha						
	c. Promosi Produk	100.000.000	8.634.300	8.634.300			
	d. Webside		1.100.000	1.100.000			
	f. Lain-lain (sebutkan.....)						
7.3	Pengembangan institusi bisnis KSM (Inisiasi awal)						
	a.						
	b.						
	dst....						
	JUMLAH	1.500.000.000	755.439.037	755.439.037	755.439.037	50,36%	

***) Khusus diisi untuk rincian point 7.**

	BDI Tahap 1 dipa 2014	1.500.000.000		755.439.037	50,36%
	dana yang disalurkan ke pengelola	949.902.500		755.439.037	79,53%
	BDI Tahap 1 dipa 2016	350.000.000			0,00%
	dana yang disalurkan ke pengelola				
	BDI Tahap 2 dipa 2016	150.000.000			0,00%
	dana yang disalurkan ke pengelola				

Sumber: Koordinator Kota Palembang, 2019

Berdasarkan Tabel I.3 Pemanfaatan BLM mencerminkan pengelolaan BDC belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari membandingkan progress pemanfaatan BLM dengan ketentuan plafon pembiayaan BLM. Total dana yang telah dimanfaatkan yaitu sebesar 50,36 % dari BLM tahap I. Pemanfaatan BLM untuk fasilitasi pengembangan usaha KSM sebesar 23,5% dan pemanfaatan biaya CB (pengembangan kapasitas) pemerintah daerah, komite BDC dan pengelola BDC dengan pemanfaatan 0,0 % mencerminkan BDC belum optimal dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan usaha KSM potensial. Padahal pengembangan kapasitas fokus orientasinya dititikberatkan pada penguatan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan BDC, pengembangan kelembagaan dan usaha KSM, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, BKM, relawan dan pendamping.

Biaya operasional (BOP) BDC mendekati habis dan belum mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri. BOP pengelola BDC telah dimanfaatkan sebesar 99,99% dan BDC belum mampu membiayai kebutuhannya sendiri, laporan akuntan independen menyatakan pendapatan operasional pendapat yang diperoleh selama periode 2017 besar akan tetapi kinerja laba menurun atau rugi, disebabkan oleh justifikasi biaya gaji. Hal ini bertentangan dengan tujuan umum kegiatan pilot BDC yaitu pemerintah daerah mampu melaksanakan pilot BDC untuk mengembangkan usaha KSM di wilayahnya, dengan capaian pendapatan BDC minimal mampu menutupi seluruh biaya operasional BDC, pada tahun ke dua setelah beroperasi. Pada

BDC Sriwijaya kota Palembang yaitu pada tahun ke dua setelah beroperasi pendapatan BDC belum mampu untuk menutupi seluruh biaya operasioanalnya. Hal ini tentu saja terdapat kesenjangan teori dengan dengan akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan pertimbangan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi *Stakeholder* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Kasus pada *Business Development Center* Sriwijaya Kota Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi *stakeholder* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada *Business Development Center* Sriwijaya kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi *stakeholder* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada *Business Development Center* Sriwijaya kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dengan adanya akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada *Business Development Center* Sriwijaya Kota Palembang.

2. Bagi BDC Sriwijaya Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Program KOTAKU.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusfi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusfi. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba empat
- Arifuddin Mas'ud, Safaruddin dan Falzilah. (2017). Persepsi Pengelola Keuangan Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 2(2): 23-38
- Danang Sunyuto. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Dheny Purnomo. (2016). Persepsi *Users* atas Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah). *E Jurnal Katalogis*. 4(6): 91-100
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016. Tentang *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). *Prosedur Operasional Baku (POB) Penyelenggaraan Pilot Business Development Center (BDC)*
- Duwi Priyatno. (2016). *SPSS Handbook*. Yogyakarta: MediaKom
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat
- Ervita Safitri dan Kholilah. (2015). *Buku Ajar Statistik 1*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang
- Hari Susanto, Supranoto dan Hary Yuswadi. (2016). akuntabilitas, transparansi dan kinerja UPK kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 14(1): 1-7
- Herry Tjahjono. (2011). *Culture Based Leadership*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Ihyaul Ulum. (2017). *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Irjani Pudjiastuti dan Nurdhiana. (2010). Persepsi Pemerintah Daerah terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Akuntabilitas Anggaran. *Aset*. 12(2): 125-133
- Jonathan Sarwono. (2010). *Pintar Menulis Karya Ilmiah - Kunci Sukses dalam Menulis Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Andi
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta. Andi
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Masiyah Kholmi. (2013). Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 3(1): 363-371
- Muhammad Muslihudin dan Oktafianto. (2016). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML*. Yogyakarta: Andi
- Muhammad Yasir Yusuf. (2017). *Islamic Corporate Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*. Depok: Kencana
- Mukhtaruddin Minatjik. (2011). Persepsi *Stakeholders* terhadap Kriteria Akuntabilitas, Kriteria Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*. 5(1): 1-24
- Nun Fadilah Salam. (2019). Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan dan Akuntabilitas Lingkungan pada Mal Ratu Indah Makasar. *Bongaya Journal for Research in Accounting*. 2(1): 1-10
- Rakhmat. (2017). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Andi
- Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy A. (2015). *Perilaku Organisasi (Edisi 16)*. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sarlota Singerin. (2016). Persepsi *Stakeholders* terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di SMA Kecamatan Salahatu). *Prosiding Konser Karya Ilmiah*. 2: 317-332

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Sukirman. (2009). Persepsi *Stakeholder* Sekolah terhadap Tingkat Kepentingan Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 1(2): 86-98
- Suprawoto. (2018). *Government Public Relations Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Syahiman Yusi dan Umiyati Idris. (2016). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Palembang: UPT Penerbit dan Percetakan
- Vivi Dwi Aryanti, Masiyah Kholmi, Endang Dwi Wahyuni. (2013). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri pada Badan Keswadayaan Masyarakat Betul Kota Malang. *JURNAL AKUNTANSI & INVESTASI*. 14(2): 121-128
- Welly. (2016). Efektivitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Global Masa Kini*. 7(2): 16-22